

## Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam

Andi Tenri Gading Nurul Azizah<sup>1)</sup>, Andi Anugrah Rudianti<sup>2)</sup>, M. Nur Arham<sup>3)</sup>, Kamiruddin<sup>4)</sup>  
Hukmiah Husain<sup>5)</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

<sup>1)</sup>atgazezah24@gmail.com, <sup>2)</sup> andianugrahrudianti@gmail.com

<sup>3)</sup>arhammuhammad511@gmail.com, <sup>4)</sup> kamiruddin@iain-bone.ac.id

<sup>5)</sup>hukmiahiainbone@gmail.com

Received: 10-01-2024	Revised: 13-01-2024	Accepted: 16-01-2024
----------------------	---------------------	----------------------

### Abstract

*This paper discusses fiscal policy and state expenditure in Islamic economics. The scope covers the differences between conventional and Islamic fiscal policy, the role of fiscal policy in income distribution, and state budget principles in Islam. The objectives are to understand the distinct characteristics of Islamic fiscal policy, its mechanism for equitable income distribution, and budget management based on Islamic values. The paper relies on literature review method of books, journals, and historical analysis. The results indicate that Islamic fiscal policy emphasizes spiritual values, social justice, and universal brotherhood, in addition to economic goals. The policy prohibits interest, uses zakat as a distribution tool, and manages state finance to promote public welfare. Historically, early Islamic governance applied efficient and egalitarian budget principles. In conclusion, Indonesia needs to integrate Islamic principles within its fiscal policy and budgeting system to achieve social justice and economic prosperity.*

**Keywords:** *Islamic fiscal policy, Income distribution, State expenditure budget*

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kebijakan fiskal dan belanja negara dalam ekonomi Islam. Cakupannya meliputi perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dan Islam, peran kebijakan fiskal dalam distribusi pendapatan, serta prinsip penganggaran negara dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik khas dari kebijakan fiskal Islam, mekanisme distribusi pendapatannya yang merata, serta pengelolaan anggaran berbasis nilai-nilai Islam. Artikel ini menggunakan metode tinjauan literatur dari buku, jurnal, dan analisis historis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam mengedepankan nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan persaudaraan universal, di samping tujuan ekonomi. Kebijakan tersebut melarang bunga, menggunakan zakat sebagai instrumen distribusi, serta mengelola keuangan negara untuk memajukan kesejahteraan publik. Secara historis, tata kelola keuangan di masa awal Islam menerapkan prinsip anggaran yang efisien dan egaliter. Kesimpulannya, Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dan sistem penganggarnya untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi.

**Kata kunci:** kebijakan fiskal Islam, distribusi pendapatan, anggaran belanja negara

## PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah suatu negara merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola perekonomian. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga memiliki peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi Islam seperti distribusi pendapatan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.<sup>1</sup> Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah belanja negara. Melalui pengelolaan belanja yang baik, pemerintah dapat mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja negara tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk merealisasikan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan belanja negara dalam perspektif ekonomi Islam perlu dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama.

Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer dikumpulkan dari studi literatur buku ekonomi Islam, artikel jurnal, dan dokumen historis

---

<sup>1</sup> Oktarini Khamilah Siregar, *Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia* (Thesis Commons, 19 February 2022) <<https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>>.

<sup>2</sup> Ihdi Aini, 'Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17.2 (2019) <<https://doi.org/10.32694/010760>>.

yang relevan. Buku dan artikel dijadikan sebagai sumber data terkait konsep kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis historis juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan mengenai implementasi kebijakan fiskal dan belanja negara pada masa pemerintahan Islam awal. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan topik utama yang dibahas, yaitu: prinsip dan perbedaan kebijakan fiskal Islam dan konvensional, instrumen kebijakan untuk distribusi pendapatan, serta prinsip penganggaran negara berbasis nilai-nilai Islam.

Data terpilih tersebut memberikan landasan konseptual untuk menganalisis perumusan kebijakan fiskal yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan informasi ke dalam beberapa aspek pembahasan. Hasil analisis perbandingan, konseptual, dan historis disajikan secara deskriptif untuk menjawab tujuan kajian. Kesimpulan ditarik untuk merekomendasikan implikasinya bagi pembuatan kebijakan saat ini yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Fiskal Konvensional vs Kebijakan Fiskal Islam**

Secara konvensional kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.<sup>3</sup> Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus

---

<sup>3</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: BPF EYogyakarta, 1997), h. 257.

bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.<sup>4</sup>

Kebijakan fiskal dalam negara Indonesia tercermin dari APBN, dimana dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Ketika APBN digunakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat maka inflasi akan terkendali dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro yaitu negara.<sup>5</sup>

Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal.

Menurut J. Chelliah, tujuan kebijakan fiskal berikut harus diupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, yakni<sup>6</sup>:

1. Tingkatkan hubungan antara tabungan dan pendapatan ( $y$ ) terhadap konsumsi.
2. Tingkatkan investasi
3. Menggerakkan aliran beban atau biaya yang efisien
4. Minimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang signifikan

### **Kebijakan Fiskal Dalam Islam**

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional (yaitu untuk stabilitas ekonomi, alokasi dan distribusi),<sup>7</sup> akan tetapi terdapat perbedaan komitmen yaitu nilai-nilai spiritual,

---

<sup>4</sup> Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makroekonomi: Edisi Keempatbelas*, terj. Haris Munandar (Jakarta; Penerbit Erlangga, , 1997), h. 346

<sup>5</sup> Desi Isnaini, 'Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara...', 3.1 (2017).

<sup>6</sup> Cynthia Oktivany and others, 'Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam', 4 (2023).

<sup>7</sup> Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130

keadilan sosioekonomi dan persaudaraan manusia.<sup>8</sup> Menurut Metwally, setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, diantaranya<sup>9</sup>:

*Pertama*, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui, diantara prinsip-prinsip dan hukum lain, prinsip bahwa “kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.

*Kedua*, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini.

*Ketiga*, Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

Ada beberapa karakteristik kebijakan dari fiskal syariah terhadap ekonomi, yakni :

1. Beban publik jarang terjadi karena pengeluaran ditentukan oleh penerimaan atau pendapatan publik.
2. Perpajakan proporsional dalam ekonomi Islam, pajak dikenakan sebanding dengan produktivitas. Misalnya, kharaj mendasarkan jumlah pajak pada jenis tanaman, metode pengairan, dan kesuburan tanah.

---

<sup>8</sup> Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2002

<sup>9</sup> Nuruddin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006

3. Zakat tidak dihitung berdasarkan jumlah dan kualitas barang, tetapi dengan keuntungan.<sup>10</sup>

### **Kebijakan Fiskal dan Distribusi Pendapatan**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal.<sup>11</sup>

### **Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara**

Kebijakan fiskal adalah komponen penting bagi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia.<sup>12</sup> Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosio-ekonomi, komitmen ideologi dan hakikat sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi sekuler konsep kesejahteraan hidup adalah dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Di dalam Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan akhirat dan peningatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material.

### **Distribusi Pendapatan**

Konsep distribusi bertujuan untuk menyalurkan kebijakan pemerintah dalam aspek pemerataan pendapatan yang tidak boleh hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan

---

<sup>10</sup> Aini.

<sup>11</sup> Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 94

<sup>12</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 197.

ekonomi. Distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Tidak sedikit kesalahan perencanaan pembangunan di negara berkembang yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dan penghapusan kemiskinan, namun terlalu terkonsentrasi pada upaya peningkatan *Gross National Bruto*.<sup>13</sup> Hal ini mengakibatkan kebijakan fiskal dalam konteks distribusi, kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada kelompok yang kaya dan kuat. Hasil pembangunan lebih dinikmati oleh lapisan tertentu saja sehingga menimbulkan kesenjangan.

Ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi seperti yang diterapkan pemerintah sekarang ini. Kebijakan ekonomi Islam memuliakan manusia sebagai “manusia” yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sementara, kebijakan ekonomi kapitalis memuliakan materi dengan menjamin tercapainya peningkatan produksi barang dan jasa secara maksimum, maka tidak heran kalau sistem ekonomi saat ini menempatkan aspek produksi pada tataran kebijakan ekonomi sehingga menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya.

### **Kebijakan Anggaran Belanja dalam Islam**

Menilik ke dalam catatan sejarah Islam, tidak dikenal istilah kata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Islam, akan tetapi dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujudkan dalam bentuk lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan Baitul Mal yang kurang lebih mempunyai tugas yang sama dengan APBN dalam sistem sekuler. Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Dahlan, *Kuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, h. 102.

<sup>14</sup> Lilik Rahmawati, “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam”, *Jurnal El-Qist*: 2012, Vol. 2 No.2, h. 234

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan yang justru sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia.<sup>15</sup> Terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, maka dalam Islam telah diatur mekanismenya dalam suatu negara. Peran Negara Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan mengalokasikan pendapatan yang ada secara proporsional serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang optimal dan sesuai syariah. Kebijakan mengatur dan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan dikenal dengan kebijakan fiskal.<sup>16</sup>

Secara sistematis sumber penerimaan pada zaman khalifah dan Khulafaurrasyidin dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel 2.1 Sumber Penerimaan Pemerintah Islam Menurut Sumber Penerimaan Pemerintah**

<b>Sumber Penerimaan Pemerintah</b>		
<b>Dari Warga Muslim</b>	<b>Dari Warga Nonmuslim</b>	<b>Dari Sumber lainnya</b>
Zakat, wakaf, sedekah, pajak pertanian,	Jizyah, kharaj, pinjaman, 'usyur	Hadiah, fa'I ghanimah, uang tebusan, dan pinjaman

Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Jadi pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian<sup>17</sup>:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia

<sup>15</sup> Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 92

<sup>16</sup> Lilik Rahmwati, "Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam", h. 233

<sup>17</sup> Lilik Rahmwati, "Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam", h. 253



3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas, dan secara rincinya, bahwa pembelanjaan negara harus didasarkan kepada pada:<sup>18</sup>

1. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan demikian jauh dari sifat mubazir dan kikir disamping alokasinya harus sesuai syariah
2. Prinsip keadilan, tidak hanya berpihak pada orang kaya dalam pembelanjaan
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau dhoruroh, hajiyyah, dan kamaliyah

Terkait sistem anggaran yang islami, dalam sejarah perjuangan Rasulullah saw mencatat sekali saja anggaran defisit yaitu ketika jatuhnya kota Mekah. Utang pemerintah ini dibayar sebelum satu tahun yaitu setelah usainya perang Hunain. Porsi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Misalnya khalifah Umar pada zamannya pernah memerintah Amr bin Ash yang menjabat sebagai gubernur Mesir untuk membelanjakan minimal sepertiga dana Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur. Beliau juga membangun kanal antara Kairo dan pelabuhan Suez untuk memfasilitasi pelayaran antara Hijaz dan Mesir, selain juga membangun dua kota bisnis Kufah dan Basrah.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks ekonomi syariah, kebijaksanaan fiskal dan belanja negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial negara, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara. Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Selain itu, kebijakan

---

<sup>18</sup> Lilik Rahmwati, "Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam", h. 254

anggaran belanja dalam perspektif Islam juga menekankan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik serta pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, kebijaksanaan fiskal dan belanja negara dalam perspektif ekonomi syariah memiliki implikasi yang mendalam terhadap keadilan distribusi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aini, Ihdi, 'Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17.2 (2019) <<https://doi.org/10.32694/010760>>
- Dahlan, Ahmad. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Isnaini, Desi, 'Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara...', 3.1 (2017)
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Majid, M. Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: PSSI STIS, 2003.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, Sofya Tika, and Faisal Hidayat, 'Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam', 4 (2023)
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rianto Al-Arif, M. Nur. *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudirman, I. Wayan. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana, 2011.

Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.

Siregar, Oktarini Khamilah, *Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia* (Thesis Commons, 19 February 2022) <<https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>>

STAI An Nawawi Purworejo, and Imam Turmudi, 'Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam', *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.37758/annawa.v1i2.143>>